

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang lebih menitikberatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Proses ini berpengaruh langsung kepada berbagai bentuk usaha yang ada di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, di Indonesia terbentuk berbagai macam jenis usaha, baik usaha berskala kecil maupun usaha berskala besar. Di era globalisasi, berbagai jenis usaha tersebut dituntut untuk lebih maju dan dapat bertahan dalam menjalankan jenis usahanya.

Salah satu jenis usaha di Indonesia yang mempunyai prospek yang cerah adalah pengembang perumahan. Pengembang perumahan memegang peran yang penting dalam menyediakan rumah layak yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Dan dengan adanya perusahaan pengembang perumahan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja di bidang konstruksi bangunan sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Bagi pebisnis yang dinamis, pengembangan usaha tentu akan terus menerus dilakukan. Biasanya pengembang perumahan akan melakukan pinjaman modal dalam jumlah besar di bank dengan tujuan menambah

jumlah produksi perumahan. Sebagai lembaga keuangan yang sah bank mempunyai banyak syarat yang harus dipenuhi calon debitur untuk mendapatkan pinjaman. Salah satu syarat penting dan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan calon debitur yang menyediakan informasi mengenai kapasitas untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

Fakta yang terjadi adalah banyak pelaku usaha khususnya pengembang perumahan yang membuat laporan keuangan yang sederhana yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dan biasanya secara struktural di dalam perusahaan pengembang perumahan tidak mempunyai bagian keuangan, mereka hanya mengandalkan bagian administrasi untuk menangani laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang tidak sesuai standar menjadi kendala utama bagi pengembang perumahan untuk melakukan pinjaman modal pada bank.

Pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif 1 Januari 2011. Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik agar menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Setiap perusahaan memiliki prinsip *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang datang dan dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga. SAK ETAP disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunanya yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang mayoritas adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. ETAP sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktivitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh satu orang atau sekelompok

orang yang modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia menempati angka sekitar 80 %. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan. Komponen laporan keuangan entitas dalam SAK ETAP (2009:3.12) meliputi:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:
 - a. Seluruh perubahan ekuitas
 - b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi

Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut. Hal ini dimungkinkan apabila misalnya pihak otoritas berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya

ataupun terlalu rumit untuk entitas yang mereka awasi. Perbedaan mendasar yang membedakan SAK ETAP dengan PSAK antara lain :

1. Penyajian laporan keuangan pada SAK ETAP sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca yang menghilangkan pos aset keuangan, properti investasi yang diukur pada nilai wajar, aset biologis yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar, kewajiban berbunga jangka panjang, aset dan kewajiban pajak tangguhan, serta kepentingan nonpengendalian.
2. Penyajian laporan laba rugi tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi.
3. Pada catatan atas laporan keuangan pengungkapan modal dalam SAK ETAP berbeda dengan PSAK.
4. Laporan arus kas pada SAK ETAP arus kas aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung dan tidak mengatur arus kas mata uang asing.
5. Tidak adanya peraturan mengenai laporan keuangan konsolidasi dan terpisah dalam SAK ETAP.
6. Dalam instrumen keuangan dasar SAK ETAP ruang lingkupnya adalah investasi pada efek tertentu.
7. Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak dalam SAK ETAP ruang lingkupnya adalah entitas asosiasi menggunakan metode

akuntansi biaya dan entitas anak menggunakan metode akuntansi ekuitas.

8. Metode yang digunakan pada properti investasi dalam SAK ETAP adalah metode biaya sedangkan pada PSAK adalah metode nilai wajar.
9. Aset tetap pada SAK ETAP tidak menggunakan pendekatan kompenenisasi, revaluasi dapat dilakukan jika sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak perlu *review* nilai residu.
10. SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan *matching concept*.
11. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan SAK ETAP.

Adanya SAK ETAP dengan prinsip kesederhanaan dapat memberikan kemudahan dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP diharapkan memberi kebebasan berbisnis, kebebasan berinvestasi dan membangun ekonomi kerakyatan. Selain itu SAK ETAP juga memberi kemudahan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Namun pada kenyataannya SAK ETAP belum banyak diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik dalam menyusun laporan keuangan di Indonesia khususnya yang ada di kota Pontianak. Adapun objek penelitian ini ialah

PT. Golden Indah Properti yang berdiri sejak tahun 2011 dan bergerak di bidang pengembangan perumahan. Pada penelitian awal PT. Golden Indah Properti belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Dengan menggunakan SAK ETAP, PT. Golden Indah Properti dapat membuat laporan keuangan dengan benar, tentunya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga bisnis yang dijalani dapat lebih profesional dalam hal menyajikan laporan keuangan yang dapat mempermudah syarat peminjaman modal ke pihak bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PT. GOLDEN INDAH PROPERTI.**

1. 2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan PT. Golden Indah Properti?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan SAK ETAP pada PT. Golden Indah Properti.

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan PT. Golden Indah Properti yang sesuai dengan SAK ETAP.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan SAK ETAP pada PT. Golden Indah Properti.

1. 4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi :

1. PT. Golden Indah Properti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan menjadi rekomendasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi salah satu tambahan referensi bagi rekan mahasiswa dan pihak lain yang berminat dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Pihak lain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan mendorong pengembang perumahan lain menyusun dan

menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dan menjalankan usaha dengan lebih profesional.

Universitas Tanjungpura